BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terutama kebijakan dalam keuangan Negara haruslah melibatkan pemerintah daerah. Sebab, kinerja dan pengelolaan keuangan daerah saat ini menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah terlebih lagi dalam mewujudkan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luaa, nyata dan bertanggungjawab. Tuntuntan terhadap pengelolaan keuangan rakyat *(public money)* secara baik merupakan *issue* utama yanag harus dilakukan pemerintah daaerah dalam mewujudkan tujuana pemerintahan yang bersih *(clean government)*, dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam pengelolaaan keuangan daerah telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pengganti Kepmen No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Saat ini pemerintah wajib untuk mewujudkan prisnip-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik. Undang-undang nomor’ 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu, “kewenangan sangat diberikan luas kepada pemerintah untuk menjalankan urusan pekerjaan daerah dimulai dari melaksanakan pengawasan,

pengendalian evaluasi terkecuali dalam bidang politik, kemanan pertahanan, kebijakan fiskal agama dan ang lain sesuai dengan peraturan daerah". Dana perimbangan memiliki pengaruh sangat signifikan bagi pendapatan pemerintah, pusat mentransfer dana untuk pemerintah daerah sebagai biaya kebutuhan operasional serta harus dilaporkan sebagai anggaran pendapatan kabupaten, belanja kabupaten dan pembiayaan kabupaten.

Pemerintah wajib melakukan kebijakan yang mendukung untuk pembangunan daerah dalam kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan dan mengolah potensi keuangan kabupaten dan kinerja ekonomi kabupaten, peluang bagi pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia secara efisien dan efektif menurut Sargih (2003), "bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini baik, mengingat otonomi merupakan indikasi adanya kewenangan daerah bukan pendelegasian".

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memkasa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No 28 Tahun 2007). Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan pendapatn Negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan nasional.

Pajak dalam pengelolaannya, ada beberapa pajak yang masuk ke pemerintah pusat dan ada yan masuk ke daerah-daerah. Pajak yang pengelolaannya masuk ke dalam pemerintah pusat antara lain: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan pajak yang di

kelola dan dipungut oleh pemerintah daerah meliputi pajak provinsi kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, dll.

Peranan pemerintah dalam perekonomian, terkait tujuan, peran, dan manajemen keuangan dalam mencapai kemakmuran menjadi penting adanya, ditunjang dengan menerapkan aspek-aspek kebijakan fiskal seperti perpajakan, bea cukai, desentralisasi, utang, dan aset Negara. [1]

B. Fokus Peneilitian.

Fokus penelitian yang akan peneliti ajukan disini berdasarkan konteks penelitian yang sudah peneliti uraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pengelolaan keuangan daerah di kota Kediri?
2. Bagaimana cara pengelolaan pajak di kota Kediri?
3. Bagaimana cara pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pajak dapat mensejahterakan masyarakat di kota kediri?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengkaji cara pengelolaan keuangan daerah di kota Kediri.
2. Untuk mengkaji cara pengelolaan pajak di kota Kediri.
3. Untuk mengkaji cara pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pajak dalam mensejahterakan masyarakat di kota Kediri.

---

[1] Ani, Sri Rahayu, 2010, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta:PT. Bumi Aksara. Hal. 6

D. Batasan Masalah.

Pembatasan masalah ditujukan agar ruang lingkup penelitian dapat lebih jelas dan terarah dan tidak meluas. Oleh karena itu peneliti membatasi penelitian ini dengan masalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian mengenai cara atau sistem dari pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengelolaan pajak daerah khususnya pajak PBB-P2 di Kota Kediri.
2. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan penelitian terhadap masyarakat untuk mengetahui apakah masyarakat khususnya di kota Kediri sudah merasakan hasil dari pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaa pajak daerah di Kota Kediri.
3. Dikarenakan luasnya permasalahan dan kondisi real di lapangan, maka peneliti hanya melakukan penelitian dalam lingkup Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dan masyarakat khususnya ang berada di Kota Kediri.

E. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai guna bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Secara teoretis.

   Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pajak dalam mensejahterakan masyarakat.

2. Secara praktis.

a) Bagi lembaga.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di kota Kediri, dengan memperhatikan cara pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pajak yang benar atau sesuai dengan prosedur.

b) Bagi institusi IAIN Tulungagung.

Hasil penelitian berupa proposal skripsi ini diharapkan menambah wawasan dan kepustakaan tentunya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pajak yang sesuai dengan UU yang berlaku ataupun yang sesuai dengan prosedur yang diterapkan di sebuah instansi tersebut.

c) Bagi pihak lain.

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan maupun pengetahuan tentang bagaimana penerapan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pajak yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

F. Penegasan Istilah:

a) Definisi operasional

1. Pengelolaan keuangan daerah.

Adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

2. Keuangan Negara.

Yaitu semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengna pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.[2]

3. Kesejahteraan sosial.

Yaitu suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individi, kelompok dan masyarakat.

4. Pajak daerah yaitu kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

G. Sistematika Penulisan.

Penelitian ini membahas enam bab pembahasan. Bab pertama yaitu pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitin, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

[2] Ani, Sri Rahayu, 2010, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta:PT. Bumi Aksara. Hal. 264

Pada bab kedua membahas tentang kajian teori. Kajian teori berisi tentang penjabaran mengenai literatur yang digunakan dan menjadi dasar penyusunan instrument penelitian. Kajian teori yang dibahas pada bab ini adalah tentang bagaimana pengelolaan keuangan di kota Kediri dan bagaimana pengelolaan pajak daerah.

Pada bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal. Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Pada bab keempat membahas tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum objek penelitian, paparan data, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan tema skripsi. Adapun pada paparan data dan temuan penelitian terdiri dari dua poin yaitu tentang pembahasan mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pajak daerah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di kota Kediri.

Pada bab kelima berisi pembahasan yang menguraikan paparan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dikaji dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Bab ini terdiri dari dua poin yaitu pertama, tentang tata cara pengeloaan keuangan daerah dan pengelolaan pajak daerah dalam mensejahterakan masyarakat di kota Kediri.

Pada bab keenam merupakan bagian akhir dalam penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan. Bab ini akan menujukkan jawaban atas permasalahan yang diteliti yang terdiri dari kesimpulan dan saran.